

Research Article

The Relevance of Pancasila Values in the Formation of National Character to Realize a Civil Society in Indonesia

Aflah Labib Hanan

Universitas Sebelas Maret

E-mail: ultraaflah@student.uns.ac.id

Ghufron Mubarak

Universitas Sebelas Maret

E-mail: ghufronmubarak157@student.uns.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Annujum: Journal of Humaniora and Law.

Received : July 26, 2025

Revised : August 22, 2025

Accepted : September 25, 2025

Available online : October 20, 2025

How to Cite: Aflah Labib Hanan, & Ghufron Mubarak. (2025). The Relevance of Pancasila Values in the Formation of National Character to Realize a Civil Society in Indonesia. *Annujum: Journal of Humaniora and Law*, 1(4), 159–166. <https://doi.org/10.63738/annujum.v1i4.20>

Abstract

Pancasila, as the foundation of the state and the ideology of the Indonesian nation, plays a primary role in shaping the character of its citizens. Its values serve as moral and social ethical guidelines relevant to facing the challenges of globalization and the national identity crisis. This study aims to analyze the relevance of Pancasila values in shaping national character and its contribution to the realization of a civil society in Indonesia. The research method used was a literature review, examining various academic sources related to Pancasila, character education, and civil society. The results indicate that Pancasila values can strengthen moral integrity, foster national awareness, and shape just and civilized social behavior. Thus, Pancasila holds a strategic position in national character development, oriented towards the creation of a just and civilized civil society.

Keywords: Pancasila Values, Character Building, Civil Society.

Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter Bangsa untuk Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran utama dalam membentuk karakter warga negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral dan etika sosial yang relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi serta krisis identitas bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa serta kontribusinya terhadap terwujudnya masyarakat madani di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber literatur akademik terkait Pancasila, pendidikan karakter, dan masyarakat madani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat integritas moral, menumbuhkan kesadaran kebangsaan, serta membentuk perilaku sosial yang adil dan beradab.

The Relevance of Pancasila Values in the Formation of National Character to Realize a Civil Society in Indonesia

Aflah Labib Hanan, Ghufron Mubarak

Dengan demikian, Pancasila memiliki posisi strategis dalam pembangunan karakter bangsa yang berorientasi pada terciptanya masyarakat madani yang berkeadilan dan berkeadaban.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Pembentukan Karakter, Masyarakat Madani.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Di tengah arus globalisasi dan kemerosotan moral, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk menanamkan karakter bangsa yang kuat, beretika, dan nasionalis (Kaelan, 2013). Melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, diharapkan tercipta generasi yang beriman, toleran, serta bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya (Daryanto & Darmiatun, 2013). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting untuk membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab, demokratis, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan (Madjid, 2000).

Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang begitu cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar berupa pergeseran nilai dan degradasi moral yang berpotensi mengikis jati diri nasional. Fenomena seperti individualisme, intoleransi, dan memudarnya semangat gotong royong menunjukkan adanya urgensi untuk merevitalisasi nilai-nilai dasar negara sebagai kompas moral bagi generasi muda. Pembentukan karakter bangsa yang kokoh tidak lagi sekadar kebutuhan edukatif, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi keberadaan Indonesia.

Pancasila, sebagai *philosophische grondslag* dan *leitstar* dinamis, menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk menyelaraskan kehidupan beragama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam satu napas pembangunan karakter. Internalisasi nilai-nilai ini merupakan kunci utama dalam mentransformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani (*civil society*) yang mandiri, beradab, dan menjunjung tinggi hukum serta toleransi. Dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam setiap dimensi kehidupan bermasyarakat, bangsa ini tidak hanya akan mampu bertahan di tengah krisis identitas global, tetapi juga berhasil mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan demokratis sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data meliputi buku-buku teori Pancasila, jurnal ilmiah tentang pendidikan karakter, dan literatur mengenai masyarakat madani. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, interpretasi nilai-nilai, dan sintesis konsep untuk menemukan keterkaitan antara Pancasila, perkembangan karakter, dan konsep masyarakat madani (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Masyarakat Madani

Masyarakat madani (*civil society*) merupakan konsep sosial yang

menggambarkan suatu tatanan masyarakat yang beradab, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Istilah “madani” berasal dari kata *madinah* yang merujuk pada masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah, yaitu masyarakat yang menegakkan prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut Nurcholish Madjid (1999), masyarakat madani adalah masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai keadaban, demokrasi, dan penghormatan pada pluralitas. Dalam konteks modern, konsep ini tidak hanya merujuk ke agama, tetapi juga menjadi dasar dalam terwujudnya ketentraman.

Secara teoritis, masyarakat madani merupakan ruang sosial yang berada di luar negara, tetapi berfungsi mengawasi, mengimbangi, dan memberi masukan kepada negara. Cohen dan Arato (1992) menyatakan bahwa civil society adalah wilayah interaksi sosial yang independen dari negara dan ekonomi, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dan kritis. Interaksi tersebut berlangsung melalui organisasi masyarakat, komunitas, dan lembaga-lembaga yang bergerak secara otonom. Ciri utama masyarakat madani meliputi kemandirian, partisipasi, supremasi hukum, toleransi, dan penghargaan pada hak-hak sipil (Latif, 2011).

Dalam konteks Indonesia, konsep masyarakat madani sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi dasar etis dalam membangun masyarakat yang harmonis dan tidak terjebak dalam konflik perbedaan. Karakter masyarakat madani tercermin dari kemampuan warganya untuk berdialog secara dewasa, menghindari kekerasan, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas nasional.

Dengan demikian, konsep dasar masyarakat madani bukan hanya berbicara tentang kehidupan sosial yang tertib, tetapi juga mengenai pembangunan manusia yang berkarakter kuat, kritis, dan bertanggung jawab. Kualitas karakter inilah yang menjadi fondasi lahirnya masyarakat yang berkeadaban dan berkemajuan.

Keterkaitan Pembentukan Karakter dengan Masyarakat Madani

Pembentukan karakter memiliki hubungan yang sangat erat dengan terwujudnya masyarakat madani. Masyarakat madani yang ditandai oleh nilai keadaban, demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia tidak dapat terbentuk tanpa individu-individu yang memiliki karakter kuat dan bermoral. Menurut Lickona (1991), karakter yang baik bisa terlihat *dari moral knowing, moral feeling, dan moral action*, yang secara langsung memengaruhi perilaku seseorang dalam komunitas sosial. Ketika individu memiliki integritas, tanggung jawab, empati, dan kedisiplinan, mereka mampu berperan sebagai warga yang beradab dan andil dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai karakter yang kuat ini menjadi prasyarat dasar bagi munculnya masyarakat madani yang demokratis dan harmonis. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurcholish Madjid (1999), yang menyatakan bahwa masyarakat madani menuntut kualitas moral dari para anggotanya agar dapat menjalankan kehidupan sosial yang damai, egaliter, dan saling menghormati. Tanpa karakter

tersebut, masyarakat rentan terhadap konflik, intoleransi, dan ketidakadilan. Pembentukan karakter membantu menanamkan nilai toleransi, keterbukaan, serta kemampuan berdialog nilai-nilai inti dalam masyarakat madani.

Di Indonesia, pembentukan karakter berkaitan erat dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yudi Latif (2011) menegaskan bahwa Pancasila menyediakan dasar etis dan moral bagi kehidupan masyarakat, sehingga pembentukan karakter Pancasila menjadi landasan penting bagi terwujudnya masyarakat madani yang berkeadaban. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tidak hanya memperkuat moral individu tetapi juga membangun budaya sosial yang saling menghargai.

Dengan demikian, pembentukan karakter bukan sekadar proses pendidikan moral, melainkan sebuah strategi sosial untuk membangun masyarakat yang tertib, harmonis, dan demokratis. Masyarakat madani hanya dapat muncul apabila setiap individu memiliki kesadaran moral, kemampuan bekerja sama, serta komitmen menjaga keadaban publik. Karakter yang kuat menjadi fondasi utama tegaknya prinsip-prinsip masyarakat madani.

Pentingnya pembentukan karakter untuk mewujudkan masyarakat madani

Pembentukan karakter merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani ditandai oleh kehidupan sosial yang demokratis, menjunjung tinggi nilai moral, menghargai hak asasi manusia, serta mampu hidup berdampingan secara damai. Semua ciri tersebut tidak akan tercapai jika individu di dalam masyarakat tidak memiliki karakter yang kuat. Karakter seperti integritas, tanggung jawab, toleransi, empati, dan kedisiplinan menjadi kunci terciptanya interaksi sosial yang harmonis dan berkeadaban. Menurut Lickona (1991), pembentukan karakter penting karena membangun kualitas moral yang memungkinkan seseorang bertindak benar, bukan hanya mengetahui apa yang benar. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar etik dalam kehidupan berbangsa. Ketika setiap individu memiliki karakter kuat sesuai nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan maka tercipta masyarakat yang tertib, inklusif, serta mampu menumbuhkan budaya dialog. Dengan demikian, penguatan karakter tidak hanya membentuk pribadi yang beretika, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi terbangunnya masyarakat madani yang demokratis dan harmonis.

Peran Nilai Pancasila sebagai Fondasi Pembentukan Karakter

Nilai-nilai Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi sumber nilai moral yang membimbing perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter yang berlandaskan Pancasila membantu menciptakan pribadi yang berintegritas, menjunjung tinggi kemanusiaan, mampu bekerja sama, serta taat pada aturan dan keadilan. Nilai Ketuhanan menumbuhkan moralitas dan spiritualitas, nilai Kemanusiaan membentuk sikap empati dan penghargaan terhadap martabat manusia, nilai Persatuan memperkuat identitas kebangsaan serta mencegah

konflik sosial, nilai Kerakyatan mendorong sikap demokratis, serta nilai Keadilan mengajarkan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban.

Pendidikan yang menanamkan nilai Pancasila sejak dini diharapkan menghasilkan individu yang bertanggung jawab, disiplin, toleran, serta mampu berperilaku sesuai norma sosial. Inilah karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global seperti degradasi moral, intoleransi, dan disintegrasi. Ketika nilai Pancasila benar-benar tertanam dalam diri setiap warga negara, maka terbentuklah masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadaban. Dengan demikian, internalisasi nilai Pancasila bukan hanya proses pendidikan, tetapi juga strategi penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang madani.

Implementasi nilai-nilai setiap sila Pancasila dalam penguatan karakter

Sila Pertama

Sila pertama menjadi dasar pembentukan karakter moral dan spiritual. Nilai ketuhanan menanamkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut Nurcholish Madjid (1999). "Keberagamaan yang benar akan melahirkan manusia yang beradab dan mampu menahan diri dari tindakan merusak." Dengan internalisasi sila pertama, individu terbentuk menjadi pribadi yang bermoral dan menjunjung nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari.

Sila Kedua

Sila kedua membentuk karakter empati, sikap menghargai martabat manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Yudi Latif (2011) menyatakan bahwa "nilai kemanusiaan dalam Pancasila adalah jangkar moral yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi." Karakter berbasis sila kedua membantu terciptanya masyarakat yang penuh toleransi dan kemanusiaan.

Sila Ketiga

Nilai persatuan membentuk karakter cinta tanah air, toleran, dan mampu bekerja sama meski berbeda budaya, suku, atau agama. Soekarno dalam pidatonya (1 Juni 1945) berkata, "Persatuan adalah syarat mutlak bagi berdirinya negara yang kuat." Dengan menanamkan nilai sila ketiga, individu akan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sila Keempat

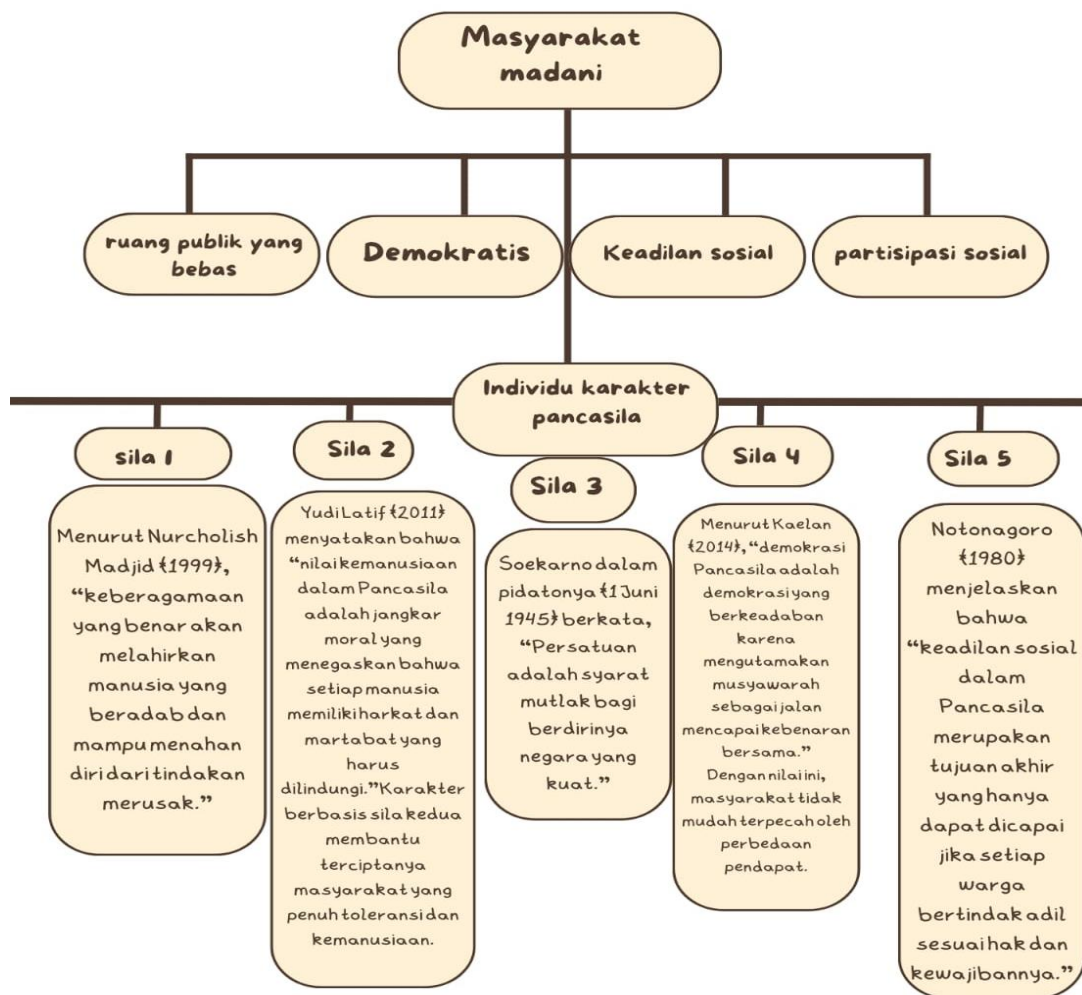
Sila ini menumbuhkan karakter demokratis, bijaksana, dan mampu menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Menurut Kaelan (2014), "demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkeadaban karena mengutamakan musyawarah sebagai jalan mencapai kebenaran bersama." Dengan nilai ini, masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan pendapat.

Sila Kelima

Sila kelima menanamkan karakter tanggung jawab, kerja keras, dan kepekaan terhadap ketidakadilan sosial. Notonagoro (1980) menjelaskan bahwa

“keadilan sosial dalam Pancasila merupakan tujuan akhir yang hanya dapat dicapai jika setiap warga bertindak adil sesuai hak dan kewajibannya.” Nilai ini melahirkan masyarakat yang sejahtera, setara, dan tidak timpang.

Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai moral dan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Nilai Ketuhanan menumbuhkan keimanan dan moralitas; nilai Kemanusiaan menumbuhkan empati dan keadilan sosial; nilai Persatuan menumbuhkan nasionalisme; nilai Kerakyatan mengajarkan demokrasi dan musyawarah; serta nilai Keadilan Sosial menjadi arah pemerataan kesejahteraan (Notonagoro, 1984).



Gambar 1. Karakter Pancasila

Tantangan Pancasila dalam Membentuk Karakter

Upaya membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Pengaruh globalisasi menjadi salah satu faktor yang paling kuat. Arus informasi yang sangat cepat membuat generasi muda lebih mudah terpapar nilai dari luar dibandingkan nilai lokal. Menurut Kaelan (2018), globalisasi dapat “mengggeser orientasi nilai dan menyebabkan melemahnya identitas kebangsaan apabila tidak disertai penguatan

karakter". Hal ini membuat nilai gotong royong, kesopanan, dan toleransi sering kalah oleh budaya yang lebih individualistis.

Tantangan lain datang dari kurangnya keteladanan dalam kehidupan nyata. Ketika masyarakat masih sering melihat perilaku korupsi, intoleransi, atau penyalahgunaan kekuasaan, proses pembentukan karakter menjadi sulit. Lickona (1991) menyebutkan bahwa karakter hanya dapat tumbuh jika individu melihat *moral modeling* yang konsisten di lingkungannya. Dengan kata lain, tanpa contoh nyata, pembelajaran nilai Pancasila hanya berhenti pada teori.

Dalam dunia pendidikan, Pancasila juga masih sering dipahami sebagai mata pelajaran hafalan, bukan pembiasaan. Menurut Kemdikbud (2022), pembentukan karakter harus dilakukan melalui pembelajaran berbasis pengalaman, bukan sekadar ceramah. Tantangan ini membuat nilai-nilai Pancasila belum menjadi kebiasaan, tetapi hanya konsep yang dikuasai secara kognitif.

Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang membuat penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial belum merata. Soedjatmoko (1995) menegaskan bahwa masyarakat yang masih berhadapan dengan ketidakadilan struktural akan kesulitan mewujudkan karakter yang berkeadilan. Akibatnya, nilai sila kedua dan kelima sering tidak berjalan sesuai harapan.

Terakhir, perkembangan teknologi dan media sosial menciptakan tantangan baru seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan polarisasi. Tantangan ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah, toleransi, dan persatuan membutuhkan model penerapan yang relevan dengan ruang digital. Dengan berbagai tantangan tersebut, pembentukan karakter berdasarkan Pancasila perlu dilakukan melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan lingkungan digital. Tanpa kerja sama ini, seperti disebut oleh Yudi Latif (2017), Pancasila hanya akan menjadi "teks normatif yang tidak cukup hidup dalam praksis".

KESIMPULAN

Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam proses pembentukan karakter bangsa, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Setiap sila Pancasila mengandung prinsip moral, sosial, dan kemanusiaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk individu yang berintegritas, menjunjung tinggi persatuan, menghargai keberagaman, bersikap adil, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik.

Perkembangan karakter berbasis Pancasila tidak hanya membentuk pribadi yang beretika, tetapi juga menghasilkan warga negara yang memiliki kesadaran kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Karakter seperti ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang demokratis, beradab, partisipatif, dan mampu menjalankan fungsi sosial secara harmonis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan syarat utama bagi terbentuknya masyarakat madani di Indonesia. Semakin kuat pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan individu dan institusi, semakin besar pula peluang

terciptanya kehidupan sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, & Darmiatun, S. (2013). *Implementasi pendidikan karakter di sekolah*. Gava Media.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Madjid, N. (2000). *Masyarakat madani dan reformasi sosial*. Paramadina.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pancuran Tujuh.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Penguatan pendidikan karakter*. Kemendikbud.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme dan Tantangan Pendidikan*. Grasindo
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character*. Bantam Books.
- Rahardjo, D. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. LSAF.
- Azra, A. (2000). *Civil Society: Demokrasi dan Islam*. Prenada Media.
- Cohen, J., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press.
- Soekarno. (1945). *Pidato 1 Juni*.
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Nasional*. Pustaka Pelajar.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter: Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*. IPPK Indonesia Heritage Foundation.